

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah proses yang melibatkan banyak aspek yang terlihat dari meningkatnya pendapatan tiap orang, Berubah dalam struktur ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari sudut pandang ekonomi regional, pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tersebut, tetapi juga hasil merata pembangunan di berbagai daerah. Jika pertumbuhan ekonomi hanya fokus pada area tertentu tanpa distribusi pembangunan yang merata, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan antar wilayah (Almanza, 2019).

Secara teoritis, ketimpangan pembangunan merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam proses pembangunan ekonomi. Teori Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun seiring dengan kematangan ekonomi. Sementara itu, teori cumulative causation dari Myrdal menyatakan bahwa wilayah yang telah maju akan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah tertinggal akibat adanya akumulasi keunggulan ekonomi. Selain itu, dalam perspektif teori growth pole, wilayah tertentu berperan sebagai pusat pertumbuhan yang mampu menarik sumber daya ekonomi dari wilayah sekitarnya, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan yang tepat. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan. Perbedaan perkembangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi permasalahan utama. Wilayah perkotaan umumnya memiliki keunggulan dalam

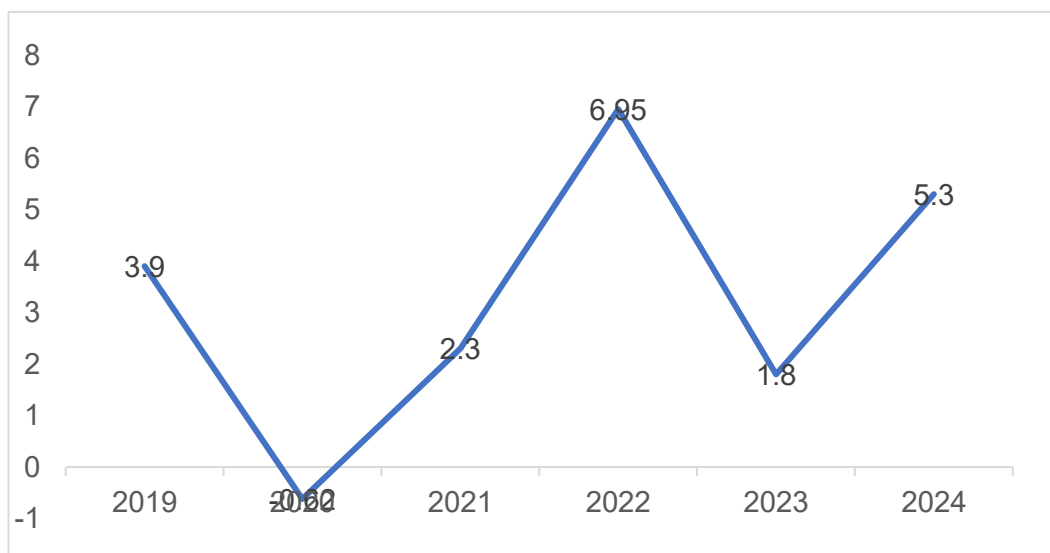
infrastruktur, investasi, serta keberagaman aktivitas ekonomi, sedangkan wilayah perdesaan masih didominasi oleh sektor primer yang relatif rentan terhadap fluktuasi ekonomi (Fitri & Rindiani, 2024). Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Kondisi ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural di Provinsi NTB menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan dinamika pertumbuhan sektoral belum merata antarwilayah. Wilayah kota cenderung mengalami perkembangan yang lebih cepat pada sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi modern, sementara wilayah desa masih didominasi oleh sektor pertanian dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam proses transformasi struktural ekonomi, di mana tidak semua wilayah mampu beradaptasi secara optimal terhadap perubahan ekonomi yang terjadi, terutama setelah pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan, tetapi juga oleh perbedaan struktur ekonomi dan daya saing sektoral antarwilayah (Firmansyah et al., 2024).

Ketimpangan struktur ekonomi dan perbedaan laju pertumbuhan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan di Provinsi NTB belum berjalan secara merata. Wilayah yang memiliki akses terhadap investasi, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi yang lebih beragam cenderung berkembang semakin cepat daripada wilayah yang masih bergantung pada sektor primer. Kondisi ini tidak sekedar berdampak pada perbedaan kontribusi ekonomi antarwilayah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di NTB masih dipengaruhi oleh konsentrasi kegiatan

ekonomi serta perbedaan potensi sumber daya antar daerah, sehingga diperlukan upaya untuk memahami pola pertumbuhan ekonomi secara lebih mendalam (Arianto & Cahyono, 2025). Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data (BPS, 2024), pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,90 persen, kemudian mengalami kontraksi sebesar -0,62 persen pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menekan berbagai aktivitas ekonomi. Selanjutnya, perekonomian mulai mengalami pemulihan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 2,30 persentase ini mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 6,95 persen. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan kembali melambat menjadi 1,80 persen sebelum meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 5,30 persen.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019–2024



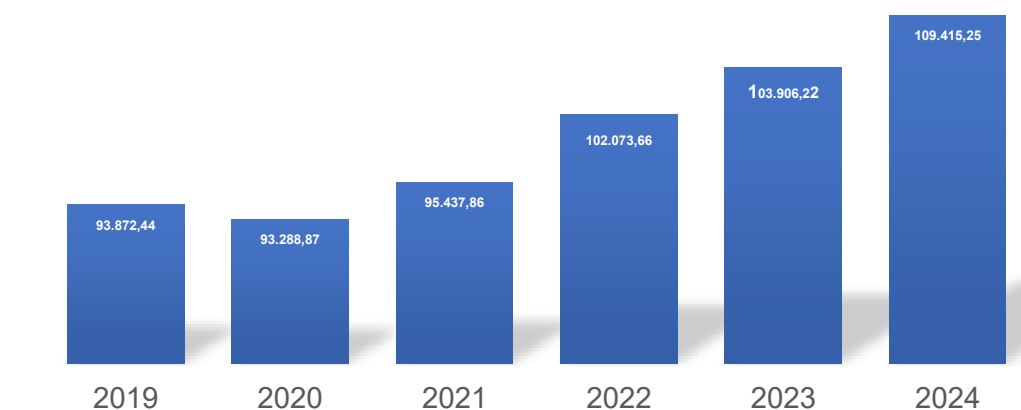
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2026).

Berdasarkan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa secara pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2024 mengalami

fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi di berbagai bidang, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2022, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Namun, ditahun 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan sebelum kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi di Provinsi NTB belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal serta struktur ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi tersebut cenderung tidak merata antarwilayah, di mana wilayah perkotaan yang didukung oleh sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata mengalami pemulihan yang lebih cepat daripada kawasan luar bandar yang masih bergantung kepada industri pertanian. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah urban dan rural di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sutanty et al., 2022).

Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2026).

Selain dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian daerah juga dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Berdasarkan data (BPS, 2024), PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, nilai PDRB tercatat sebesar 93.872,44 miliar rupiah, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 93.288,87 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2022, PDRB mengalami peningkatan menjadi masing-masing sebesar 95.437,86 miliar rupiah dan 102.073,66 miliar rupiah. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi. Pada tahun 2023, PDRB kembali meningkat menjadi 103.906,22 miliar rupiah, meskipun laju pertumbuhannya relatif melambat. Pada tahun 2024, PDRB meningkat secara lebih signifikan menjadi 109.415,25 miliar rupiah, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah secara umum (World Bank, 2020).

Pada tahun 2023, PDRB kembali meningkat menjadi 103.906,22 miliar rupiah, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Perlambatan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi melambat dan masih dikarenakan oleh berbagai faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi global dan fluktuasi kinerja sektor tertentu. Kondisi ini sejalan dengan dinamika siklus ekonomi yang menunjukkan adanya fase ekspansi dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi (IMF, 2023).

Ketimpangan struktur ekonomi dan perbedaan laju pertumbuhan antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa Pada tahun 2024, PDRB Provinsi Nusa

Tenggara Barat kembali mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 109.415,25 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah secara umum mengalami kemajuan yang positif, meskipun masih terdapat perubahan pada beberapa waktu. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah, terutama dalam bidang-bidang yang memiliki peranan penting dalam memacu perkembangan ekonomi. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya konsisten. Selain itu, perbedaan perkembangan ekonomi antar periode tersebut juga mencerminkan memiliki perbedaan kontribusi diantara sektor ekonomi. Sektor-sektor tertentu condong mempunyai pertumbuhan yang signifikan dibandingkan sektor lain, sehingga dapat mempengaruhi struktur ekonomi daerah secara keseluruhan. Lebih lanjut, perbedaan struktur dan kontribusi sektor ekonomi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara wilayah urban dan rural. Wilayah urban yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri cenderung memiliki pertumbuhan yang signifikan, sedangkan diwilayah rural masih didominasi sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang relatif lebih lambat. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah yang perlu dikaji lebih lanjut.

Tabel 1.1 PDRB ADHK Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat 2019 – 2024

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Mataram	13.811,86	13.049,74	13.475,87	13.951,85	14.581,39	15.182,76
Kota Bima	3.029,04	2.879,23	2.939,06	3.018,40	3.174,09	3.302,30
Lombok barat	10.894,64	10.128,30	10.472,21	10.834,22	11.379,48	11.723,12
Lombok Tengah	12.398,52	11.571,00	12.037,48	12.464,40	13.183,34	13.624,03

Sumber: Data Diolah (2026).

Tabel 1.1 PDRB ADHK Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat 2019 – 2024 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Timur	20.312,14	20.019,04	21.053,67	22.599,76	24.577,74	26.292,68
Lombok Utara	3.477,13	3.336,17	3.336,17	3.336,17	3.336,17	3.474,26
Sumbawa	10.470,75	10.032,95	10.220,82	10.548,58	10.929,06	11.269,83
Sumbawa Barat	12.789,11	16.470,71	16.415,89	20.379,44	18.265,35	20.458,11
Dompu	5.059,07	4.896,65	5.125,83	5.125,83	5.288,43	5.479,92
Bima	8.234,04	7.943,64	8.085,70	8.314,35	8.640,92	8.884,21
Nusa Tenggara Barat	93.872,44	93.288,87	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.415,25

Sumber: Data Diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1.1 PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2019–2024 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan PDRB dibandingkan tahun 2019, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 terhadap berbagai kegiatan ekonomi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian daerah mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB di hampir seluruh wilayah. Secara lebih rinci, Kota Mataram sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari 13.811,86 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 15.182,76 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peran wilayah perkotaan yang didukung oleh berbagai hal seperti perdagangan, jasa, dan ekonomi lain yang lebih berkembang. Pola yang serupa juga terlihat pada Kota Bima yang mengalami peningkatan PDRB secara bertahap selama periode pengamatan.

Di sisi lain, wilayah kabupaten yang umumnya bersifat rural menunjukkan dinamika yang lebih bervariasi. Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai wilayah

dengan nilai PDRB terbesar di antara kabupaten lainnya, yaitu meningkat dari 20.312,14 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 26.292,68 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar, meskipun masih didominasi oleh sektor primer. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Kabupaten Lombok Utara menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir, dan Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan yang diduga dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Secara keseluruhan, perbedaan perkembangan PDRB antar kabupaten/kota tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat pertumbuhan dan kontribusi ekonomi antarwilayah. Wilayah perkotaan cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih stabil karena didukung oleh struktur ekonomi yang lebih beragam, sedangkan wilayah perdesaan menunjukkan pertumbuhan yang lebih berfluktuasi karena bergantung pada sektor tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah urban dan rural di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbedaan ciri pertumbuhan ekonomi antarwilayah tersebut sesuai dengan hasil dalam studi pembangunan regional yang menyatakan daerah yang memiliki struktur ekonomi yang lebih bervariasi condong memiliki pertumbuhan yang lebih konsisten daripada daerah yang bertumpu pada satu atau beberapa sektor tertentu (World Bank, 2020). Oleh karena itu, analisis yang lebih rinci diperlukan untuk mengetahui sektor-sektor berpotensi serta tingkat persaingan ekonomi antar wilayah dengan menggunakan metode *Location Quotient (LQ)* dan *Shift-Share*.

Secara umum, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki karakteristik wilayah yang beragam antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Struktur ekonomi

menunjukkan adanya dominasi sektor tertentu seperti pertambangan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian Arianto & Cahyono (2025) sektor pertambangan dan penggalan serta sektor perdagangan merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi NTB. Namun, kontribusi sektor-sektor tersebut tidak terdistribusi secara merata antarwilayah, karena aktivitas pertambangan terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara sektor perdagangan dan jasa lebih berkembang di wilayah perkotaan seperti Kota Mataram. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan struktur ekonomi antara wilayah urban dan rural di Provinsi NTB.

Selain itu, perubahan struktur ekonomi NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan. Menurut penelitian Firmansyah et al. (2024) menjelaskan bahwa struktur ekonomi NTB mengalami transformasi yang ditandai dengan peningkatan kontribusi sektor jasa dan perdagangan, khususnya di wilayah perkotaan, sementara sektor pertanian masih menjadi sektor utama di wilayah perdesaan. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang kurang meluas di seluruh wilayah. Wilayah urban mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah rural, sehingga berpotensi meningkatkan disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah.

Disparitas pertumbuhan ekonomi antara wilayah di Provinsi NTB juga terlihat dari perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor ekonomi antar kabupaten/kota. Penelitian Sutanty et al. (2022) Menunjukkan bahwa perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB masih cukup jelas dan dipengaruhi oleh variasi dalam struktur ekonomi, penempatan investasi, serta perbedaan potensi sumber daya daerah. Wilayah yang memiliki variasi aktivitas ekonomi yang

lebih beragam dan investasi yang lebih tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal pembangunan ekonomi yang merata (*das sollen*) dengan kenyataan empiris yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah (*das sein*).

Periode 2019–2024 merupakan periode yang penting dalam perkembangan ekonomi Provinsi NTB karena mencakup pemulihan terhadap ekonomi setelah pandemi. Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang banyak terkonsentrasi di wilayah urban. Namun, pada periode pemulihan ekonomi, sektor-sektor tersebut kembali menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, terutama di wilayah perkotaan yang memadai dalam hal ekonomi dan akses ekonomi yang lebih baik. dibandingkan, di wilayah rural yang masih bergantung pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif lebih lambat. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan ekonomi antara wilayah urban dan rural.

Dalam mengevaluasi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan cara analisis yang efisien untuk mengenali struktur ekonomi dan keuntungan kompetitif suatu daerah. Cara *Location Quotient (LQ)* diterapkan untuk menemukan sektor-sektor dasar dan non-dasar dari suatu daerah, sehingga dapat diketahui bidang-bidang yang memiliki keuntungan komparatif dan berfungsi sebagai pendorong ekonomi lokal. Di sisi lain, cara *Shift-Share* digunakan untuk menganalisis perkembangan sektor dan mengidentifikasi keuntungan kompetitif daerah dibandingkan dengan daerah lain. (Ibramsyah et al., 2024) menyatakan bahwa analisis LQ dapat digunakan untuk menemukan sektor unggulan daerah,

sementara (Pramaria & Abstrak, 2022) menjelaskan bahwa analisis *Shift-Share* dapat digunakan untuk menilai daya saing sektor ekonomi daerah. Oleh karena itu, kombinasi kedua cara ini dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai ketidakrataan pembangunan ekonomi wilayah.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk menganalisis sektor unggulan dan struktur ekonomi di Provinsi NTB, masih ada kekurangan penelitian yang perlu diatasi. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menekankan pada identifikasi sektor unggulan atau pertumbuhan ekonomi daerah secara umum, tanpa membandingkan disparitas pembangunan antara wilayah urban dan rural dalam periode terbaru yang mencakup efek dari pandemi COVID-19 serta proses pemulihan ekonomi. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggabungkan analisis *Location Quotient* dengan *Shift-Share* secara bersamaan untuk meneliti perbedaan dalam pembangunan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi NTB. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk menilai perbedaan dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan pendekatan analisis yang lebih sistematis dan terkini. Berdasarkan penjelasan tersebut, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah kota dan desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode waktu 2019 hingga 2024 dengan memanfaatkan metode *Location Quotient (LQ)* dan *Shift-Share*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi regional, khususnya dalam analisis perbedaan pembangunan antar wilayah, serta menawarkan kontribusi praktis sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berfokus pada potensi sektor unggulan masing-masing daerah. Studi ini sangat penting mengingat ketidakseimbangan

pembangunan yang tidak terkelola bisa menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah urban dan rural di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)*?
2. Bagaimana komponen pergeseran struktural dan daya saing sektoral memengaruhi disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah urban dan rural di Provinsi NTB berdasarkan analisis *Shift-Share*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah urban dan rural di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)*
2. Untuk mengetahui komponen pergeseran struktural dan daya saing sektoral memengaruhi disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah urban dan rural di Provinsi NTB berdasarkan analisis *Shift-Share*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi regional, khususnya dalam kajian mengenai disparitas pembangunan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

2. Menambah referensi empiris mengenai penerapan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift-Share* dalam menganalisis struktur ekonomi, sektor basis, pertumbuhan sektoral, dan daya saing antarwilayah.
3. Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pembangunan ekonomi daerah, terutama penelitian yang menggunakan pendekatan analisis sektoral.
4. Memberikan informasi mengenai karakteristik sektor unggulan dan tingkat daya saing wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan penelitian di bidang ekonomi regional.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi sektor unggulan di masing-masing wilayah.
2. Memberikan informasi mengenai kondisi struktur ekonomi, sektor basis, serta daya saing wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pembangunan daerah.
3. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai ekonomi regional, khususnya yang berkaitan dengan analisis disparitas pembangunan dan sektor unggulan.
4. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang berorientasi pada pengurangan disparitas ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menjaga fokus penelitian, maka batasan penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Penelitian hanya berfokus pada analisis struktur dan pertumbuhan ekonomi sektoral berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Penelitian tidak membahas faktor non-ekonomi, seperti aspek sosial, politik, kelembagaan, maupun kebijakan pemerintah yang juga dapat memengaruhi disparitas pembangunan ekonomi.
3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2019–2024 untuk menggambarkan kondisi sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19, sehingga belum mencerminkan tren